KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Benahi sektor tambang, komisi XII dukung upaya penertiban IUP
Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Benahi Sektor Tambang

Komisi XII Dukung Upaya Penertiban IUP

ANGGOTA Komisi XII DPR Beniyanto Tamoreka memuji langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menata sektor pertambangan nasional melalui evaluasi dan penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah.

Kebijakan yang dijalankan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka memperkuat tata kelola sektor mineral dan batubata (minerba). Kebijakan itu juga memastikan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berjalan lebih tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.

"Langkah ini menunjukkan keberanian Pemerintah dalam membenahi sektor pertambangan," ujar Beniyanto dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera mengevaluasi dan mencabut IUP pertambangan yang tak sesuai aturan. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri, Kepala Badan dan Dirut BUMN di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Beniyanto melanjutkan, pembenahan sektor pertambangan tidak hanya dari sisi peningkatan produksi, tetapi juga penataan izin, kepatuhan terhadap tata ruang, serta perlindungan kawasan hutan dan lingkungan.

Dengan itu, evaluasi menyeluruh terhadap IUP, termasuk pencabutan izin di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi, menjadi momentum penting untuk memperbaiki struktur pengelolaan sektor pertambangan. Karena sektor tambang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan.

Namun, ia mengingatkan kebijakan ini harus berjalan beriringan dengan penguatan hilirisasi minerba. Tujuannya agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

"Kita ingin sektor tambang tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, industri turunan, dan lapangan kerja di dalam negeri," harap politikus Golkar ini.

Selain itu, penertiban perizinan tambang juga akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas investasi di sektor minerba. Karena, hanya pelaku usaha yang patuh dan memiliki kinerja baik yang dapat beroperasi. Penertiban ini juga memperkuat kepastian hukum dan transparansi, termasuk melalui sinkronisasi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) agar produksi tetap terkendali dan sesuai kebutuhan nasional.

"Kami akan mengawal implementasi kebijakan penataan sektor pertambangan agar tetap berada pada jalur kepentingan nasional. Ini juga memberikan manfaat nyata bagi daerah penghasil dan masyarakat luas," tegas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng) ini. ■ TIF